

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah telah resmi dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001. Dalam UU No 22 tahun 1999 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa pembangunan daerah di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan sistem desentralisasi fiskal.

Kewenangan pemerintah pusat adalah mencakup 5 sektor yaitu pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan serta agama. Kebijakan selain dari wewenang pemerintah pusat, dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut dalam meningkatkan pembangunan. Perencanaan yang akan dilakukan harus matang dan sesuai dengan potensi daerah agar pemanfaatan daerah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional daerah tersebut.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang



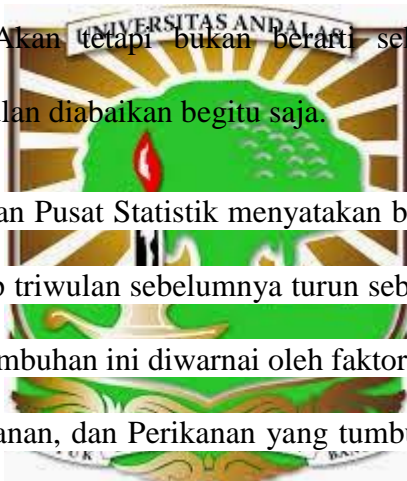
menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono,1999,1).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992). Dari pernyataan dua orang tokoh diatas, terdapat kesamaan diantara keduanya yaitu pertumbuhan harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Karena tujuan akhir dari pembangunan adalah penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi suatu daerah misalnya dari pertanian ke industri yang menggunakan teknologi.



Menurut W. Arthur Lewis dalam teorinya model dua sektor Lewis (Lewis two sector model) di negara sedang berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Teori Lewis diakui sebagai teori “umum” yang membahas proses pembangunan di negaranegara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja. (Todaro, 2004,133).

Terlihat bahwa sektor perekonomian berubah seiring dengan meningkatnya pembangunan suatu wilayah dari sektor pertanian ke sektor jasa atau sektor industri. Disini pemerintah daerah harus kreatif dalam membuat perencanaan sesuai perkembangan tersebut atau dalam merencanakan arah pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, konsep pertumbuhan daerah juga tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional yaitu berkaitan dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Permintaan terhadap barang dan jasa dari luar daerah tersebut dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan daerah. Hal ini dapat terwujud dengan berspesialisasi terhadap sektor yang menjadi potensi yang dapat diekspor dari daerah tersebut. Akan tetapi bukan berarti sektor lain yang bukan merupakan sektor unggulan diabaikan begitu saja.



Dalam terbitan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa .

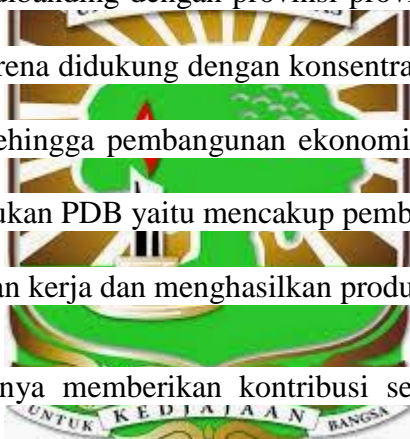
**Tabel 1.1 Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (%)**

Wilayah/ pulau	2011	2012	2013	
			Triw 1	Triw 2
<b>Sumatera</b>	<b>23,57</b>	<b>23,77</b>	<b>23,92</b>	<b>23,90</b>
Jawa	57,59	57,62	57,83	58,15
Kalimantan	9,55	9,30	8,93	8,73
Sulawesi	4,61	4,74	4,70	4,81

Maluku dan Papua	2,13	2,06	2,13	1,91
Bali & Nusa Tenggara	2,55	2,51	2,49	2,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Dari tabel diatas kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,15 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,90 persen, dan Pulau Kalimantan 8,73 persen , sementara yang paling rendah adalah Pulau Maluku dan Papua memberikan kontribusi paling kecil yaitu 1,91%. Dapat terlihat bahwa provinsi yang ada di Pulau Jawa lebih maju dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu salah satunya karena didukung dengan konsentrasi pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa sehingga pembangunan ekonominya lebih cepat. Peranan wilayah dalam pembentukan PDB yaitu mencakup pembangunan industri-industri baru, penciptaan lapangan kerja dan menghasilkan produk barang dan jasa.



Pulau Sumatera hanya memberikan kontribusi setengah dari Pulau Jawa namun jumlah ini lebih dari pulau lainnya . Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh faktor yang menjadikan Pulau Sumatra lebih maju secara ekonomi. Faktor yang mendukung besarnya kontribusi adalah antara lain infrastruktur , kebijakan daerah dan sumber daya alam atau potensi yang terdapat di daerah tersebut. Karena produk unggulan dari suatu daerah dapat membantu mempercepat pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut. Barang dan jasa yang diekspor ke daerah atau negara lain menjadi produk yang memiliki potensi unggulan yag didukung dengan jumlah sumber daya yang melimpah di daerah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pembangunan yang dilakukan harus didasarkan pada kekhasan pada daerah masing-masing. Hal ini terkait dengan potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda sehingga setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi unggulan yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Identifikasi sektor unggulan salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode ekonomi basis. Dimana sektor basis merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi, Sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Sjafrizal, 2008).



Sektor basis mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah yang mana keberadaannya dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Karena didasari oleh faktor banyaknya sumberdaya atau modal yang terdapat di suatu daerah. Oleh karena itu sektor ini menjadi sektor yang paling mayoritas menjadi jenis pekerjaan masyarakat setempat. Jenis pekerjaan juga menjadi cerminan pendapatan perkapita masyarakat, dan ketimpangan. Apakah pendapatan merata atau tidak, hal ini tergantung kepada pemerintah yang mengatur supaya di dalam masyarakat tidak terjadi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya perubahan struktur didalam perekonomian masyarakat.

Sektor pertanian dan industri memang menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak di Indonesia tetapi sektor lainnya juga semakin berkembang. Selain berfokus kepada potensi unggulan daerah, kontribusi sektor lainnya juga harus di tingkatkan melalui peningkatan investasi atau pemberian kredit kepada

swasta atau individu yang bekerja dalam sektor tersebut. Rata-rata sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah akan berdampak positif terhadap pemberian kredit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan pertumbuhan ekonomi regional . Berikut adalah tabel persentase dampak pemberia kredit terhadap pertumbuhan regioal :

**Tabel 1.3 Kredit Sektoral dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Wilayah Sumatera)**

No	Sumatera	Pertanian	Perikanan	Pertambangan & Penggalian	Konstruksi	Industri Pengolahan
1	Aceh	1.20	0	0	-3.16	-1.18
2	Sumatera Utara	2.56	0	0	0	-1.6
3	Sumatera Barat	4.11	-27.91	-0.71	0	0.55
4	Riau	-0.37	31.24	-3.11	0	-1.16
5	Jambi	7.33	-74.18	0.54	0	0.20
6	Sumatera Selatan	6.03	56.98	7.93	-10.97	-0.68
7	Bengkulu	2.54	-12.60	-0.78	0	0
8	Lampung	2.47	0	4.97	24.22	-2.17
9	Kep.Bangka Belitung	-1.12	45.67	3.16	0	-2.78
10	Kep. Riau	-0.08	52.33	-8.74	6.4	-1.19

Sumber: Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis

Pada publikasi Otoritas Jaminan Keuangan dikatakan bahwa berdasarkan Tabel diatas , terlihat bahwa di wilayah Sumatera terdapat dampak positif kredit terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana terlihat ketika kredit mengalir ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan maka perekonomian wilayah ini juga terangkat. Dampak positif terbesar dari kredit pertanian, perburuan dan kehutanan terlihat di provinsi Jambi, dimana 1 unit kenaikan kredit ke sektor ini akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan PDRB Jambi sebesar

7.33 unit. Sementara itu, dampak positif kredit sektor perikanan terhadap pertumbuhan PDRB terjadi di Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka dan Belitung. Sedangkan, kredit pertambangan dan penggalian berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB di Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, kredit konstruksi berkontribusi mendorong pertumbuhan PDRB di Lampung dan Kepulauan Riau. Kredit industri pengolahan relatif tidak berdampak positif bagi pertumbuhan PDRB di wilayah Sumatera, kecuali di Sumatera Barat dan Jambi.

Kredit disalurkan sesuai dengan sumber daya masing daerah , investasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan output yang maksimal. Bagaimanapun tujuan akhir dari pembangunan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, produktivitas yang meningkat akan menyerap tenaga kerja. Transformasi sektor pertanian ke sektor non-pertanian diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang mempunyai nilai input yang lebih tinggi. Artinya disini transformasi struktural ekonomi sangat berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi.

Tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kebijakan pengembangan pembangunan di sektor pertanian, industri dan perdagangan karena ketiga sektor tersebut saling berhubungan dalam kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan untuk bersaing di pasar nantinya. Selain itu juga pembangunan dapat tercipta apabila transformasi struktural ini melibatkan tenaga kerja yang lebih banyak. Pertambahan modal juga akan meningkatkan penambahan tenaga kerja tetapi kondisi ini terjadi apabila teknologi yang dipakai sifatnya tidak menggantikan pekerjaan manusia. Namun



sebaliknya diharapkan menyerapa tenaga kerja sehingga pedapatan perkapita juga lebih tinggi .

Aspek penting lain dari perubahan struktural adalah sisi ketenagakerjaan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui 2 proses transformasi dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitas tenaga kerjanya rendah ke sektor yang produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi (Clark dalam Ketut, 2001). Transformasi struktural tenaga kerja mendorong perpindahan tenaga kerja ke sektor yang produktivitasnya lebih tinggi . Dengan itu pendapatan tenaga kerja dapat mengalami peningkatan. Dengan adanya transformasi struktural maka kualitas tenaga kerja menjadi lebih baik dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya transformasi sektor pertanian ke sektor yang mempunyai produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi seperti sektor industri. Dengan pemakaian teknologi yang lebih modern maka produktivitas dapat meningkat dan produk unggulan dapat diekspor ke luar daerah.



Pandangan ini didukung oleh Clark yang telah mengumpulkan data statistik mengenai persentasi tenaga kerja yang bekerja di sektor primer, sekunder dan tertier di beberapa negara. Data yang dikumpulkannya itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan perkapita suatu negara makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja, akan tetapi sebaliknya sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja.(Sadono Sukirno, 1985,75)



Masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda . Tetapi apakah hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana dengan arah struktur ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera . Berdasarkan latar belakang, penulis merasa hal ini perlu diteliti dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur ekonomi regional di Pulau Sumatera periode 2010-2014 (Analisis Shift Share)*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Semenjak diterapkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi suatu daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang menjadi fokus utama pembangunan ekonomi . Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :



1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing provinsi di Pulau Sumatera ?
2. Apa saja sumber-sumber pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing provinsi di Pulau Sumatera?
3. Bagaimana struktur ekonomi masing-masing provinsi di Pulau Sumatera ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan karya ilmiah yang dilakukan untuk menemukan fakta terhadap waktu fenomena yang terjadi. Dalam melakukan penelitian penulis harus

menentukan tujuan penelitian . Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing provinsi di Pulau Sumatera
2. Mengetahui apa saja sumber-sumber pertumbuhan masing-masing provinsi di Pulau Sumatera
3. Mengkaji bagaimana struktur ekonomi di provinsi di Pulau Sumatera

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Salah satu hal yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian adalah agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat . Maka berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian , manfaat penelitian adalah :

1. Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bahan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan . Secara khusus agar dapat sebagai referensi dalam mengkaji tentang pertumbuhan angkatan kerja persektor di Pulau Sumatera dan arah struktur perekoomin Pulau Sumatera.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi masyarakat , swasta dan pembuat kebijakan dalam penyusunan rencana untuk kedepannya dalam meningkatkan perekonomian.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis,

## BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini Menguraikan tentang Gambaran Umum yang berkaitan dengan Objek Penelitian serta perkembangan dari Objek Penelitian tersebut.

## BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

## BAB VI : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran – saran.

